

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hal-hal yang diutarakan oleh peneliti yang sifatnya mendukung adanya penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang terdahulu, antara lain:

Sambharakresna (2009) menyatakan, bahwa akuntansi lingkungan menyediakan laporan dan informasi kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Bagi pihak internal, akuntansi lingkungan akan memberikan informasi yang membantu untuk manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sedangkan untuk pihak eksternal, akuntansi lingkungan memberikan informasi lingkungan yang berhubungan dengan kepentingan publik dan komunitas keuangan. *Environmental accounting* dan *environmental management accounting* memiliki peran yang sangat signifikan dalam strategi bisnis perusahaan. Alat baru bagi manajemen untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja lingkungan perusahaan guna mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Santoso (2012) menyimpulkan, bahwa dalam praktiknya kebanyakan biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya overhead sehingga sulit untuk dianalisis dan dievaluasi. Untuk mengelompokkan biaya lingkungan menurut model tertentu agar dapat mengukur kinerja, maka dibutuhkan akuntansi manajemen lingkungan didalamnya. Maka, model kualitas dapat diandalkan. Dengan menggunakan

sistem akuntansi biaya tradisional, sering terjadi distorsi biaya produksi. Oleh karenanya, penggunaan sistem akuntansi berdasarkan aktivitas sangat disarankan bagi industri khususnya. Dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting untuk membuat AMDAL. Serta dalam penyajian laporan tambahan mengenai lingkungan hidup perusahaan harus mempertimbangkan biaya manfaat, perusahaan akan cenderung lebih senang mengungkapkannya bila manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Setyaningtyas dan Andono (2013) menyimpulkan, bahwa dengan penerapan *Environmental Cost Accounting* perusahaan dapat mengukur dampak lingkungan fisik maupun secara finansial. Penerapan ECA dapat dilakukan dengan model biaya kualitas lingkungan dengan mengategorikan aktivitas terkait dengan pengelolaan biaya lingkungan ke dalam empat kategori biaya kualitas lingkungan yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Setelah itu membuat laporan biaya lingkungan dan laporan keuangan lingkungan. Maka didapatkan informasi-informasi yang dapat digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan terkait dengan biaya lingkungan dan pengelolaan limbah.

Meilanawati (2013) menjelaskan, bahwa perusahaan hanya mengungkapkan aktivitas sosial tanpa mencatat biaya-biaya yang telah dikeluarkan dari aktivitas tersebut pada laporan tahunan. Hal-hal yang mendasari PT. Semen Indonesia (Persero) dalam mengungkapkan biaya lingkungannya antara lain: (1) manajemen perlu mengontrol biaya yang signifikan; (2) peraturan pemerintah; (3) inisiatif bisnis sukarela; (4) pelaporan publik; (5) menyangkut komunitas; (6) serta

terdapat beberapa alasan lain perusahaan. Biaya lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) telah diidentifikasi berdasarkan teori dari Hansen Mowen (2007).

Wardiana dan Husaini (2017) menjelaskan, PG Pesantren Baru Kediri dalam mengakui biaya-biaya pengelolaan limbah menggunakan metode basis akrual. Selain itu dalam mengakui biaya pengelolaan limbah PG Pessantren Baru Kediri belum maksimal dan belum sesuai dengan kriteria suatu unsur yang harus diakui menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan tahun 2015 paragraf 83. Terdapat proses pencatatan yang tidak diakui yaitu upah pegawai tidak tetap, dikarenakan biaya tersebut diambilkan dari sisa biaya rekondisi dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar pengukuran yang dilakukan oleh PG Pesantren Baru Kediri dalam pengelolaan limbah adalah dengan dasar pengukuran berdasarkan biaya historis. Dengan begitu pengukuran yang diterapkan oleh PG Persantren Baru Kediri untuk biaya pengelolaan limbah sudah sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan tahun 2015 paragraf 100. Penyajian yang dilakukan oleh PG Pesantren Baru Kediri belum sesuai dengan PSAK No 1 tahun 2007 paragraf 09 dan paragraf 16. Selain itu biaya listrik yang digunakan pada proses pengelolaan limbah yang tidak disajikan satu dengan biaya rekondisi pengelolaan lingkungan hidup (limbah), sehingga menimbulkan ketidak sesuaian dengan PSAK No 1 tahun 2007. PG Pesantren Baru Kediri dalam mengungkapkan biaya mengenai pengelolaan limbah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 33 paragraf 66 tahun 2007.

Yuliantini dkk (2017) menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis penerapan akuntansi lingkungan pada unit Tempat

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mandala Giri Amertha khususnya BUM Desa Tajun dalam TPST tidak menyajikan biaya lingkungan secara spesifik pada laporan keuangannya. Biaya-biaya lingkungan yang terjadi dimasukan dalam rekening serumpun dalam laporan aktivitas operasi yaitu dalam biaya operasional. Maka dari itu, unit TPST BUM Desa Tajun dapat dikatakan menerapkan model normatif dalam pengakuan biaya lingkungan. Adapun dampak dari akuntansi lingkungan terkait pengolahan limbah yaitu : (1). Penerapan akuntansi lingkungan memungkinkan untuk mengelola dan menganalisis biaya lingkungan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, serta mempertimbangkan pelestarian lingkungan yang efektif dan efisien melalui pengambilan keputusan, (2). Memberikan informasi mengenai pengelolaan internal, yaitu keputusan manajemen mengenai pemberian harga kompos, pengendalian biaya overhead dan penganggaran modal, (3). Membantu para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan atau program perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, (4). Memudahkan menganalisis komponen biaya lingkungan terkait pengolahan limbah, (5). Memudahkan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan strategi pencapaian laba yang diperoleh unit TPST Mandala Giri Amertha.

Indrawati dan Rini (2018) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan tidak terdapat perlakuan khusus terhadap pelaporan biaya-biaya lingkungan dan aktivitas. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan mengidentifikasi biaya terkait pengelolaan limbah sebagai belanja langsung dan tidak langsung, apabila dibandingkan dengan teori,

biaya kualitas lingkungan yang dikeluarkan sebesar 28,21% dari biaya operasional, mengakui biaya lingkungan pada saat sudah mendapat manfaat dari hal tersebut meskipun kas belum dikeluarkan, pengukuran biaya lingkungan dengan satuan moneter rupiah yang mengacu pada realisasi biaya periode sebelumnya sebesar kos yang dikeluarkan. Biaya lingkungan disajikan dan diungkapkan secara keseluruhan dalam laporan keuangan pada biaya-biaya sejenis seperti beban layanan, beban administrasi dan umum dalam laporan laba rugi, dan sebagai bagian dari aset tetap dalam neraca, serta tidak membuat laporan khusus terkait biaya lingkungan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Lingkungan

Lingkungan Menurut ISO 14001 adalah keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan interaksinya. Lingkungan di Indonesia sering disebut lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dampak lingkungan adalah perubahan apapun yang terjadi pada lingkungan, baik yang merugikan maupun bermanfaat yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh lingkungan dan organisasi.

2. Konsep Akuntansi Lingkungan

Suwardjono (2014:10) menyatakan, akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu serta cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata apabila informasi yang dihasilkan dapat mengendalikan perilaku dari pengambil keputusan ekonomik untuk bertindak ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara yaitu alokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan, akuntansi keuangan, maupun bisnis internal akuntansi manajerial. Fokus utamanya didasarkan pada penerapan akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi manjerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal. Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*Environmental Cost*) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah (Ikhsan, 2008:14).

Ikhsan (2008:15) mengatakan, akuntansi lingkungan menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) didefinisikan sebagai suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para *stakeholders* perusahaan yang mampu mendorong

dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan. Istilah akuntansi lingkungan dibagi ke dalam dua dimensi utama. *Pertama*, akuntansi lingkungan terdiri dari biaya pribadi yaitu biaya yang secara menyeluruh langsung berdampak pada perusahaan. *Kedua*, akuntansi lingkungan merupakan biaya-biaya individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi utama atau penting dari akuntansi lingkungan yaitu mengungkapkan biaya-biaya lingkungan kepada *stakeholders*. Pelaporan biaya-biaya lingkungan memungkinkan *stakeholder* dapat termotivasi untuk mengidentifikasi cara untuk mengurangi biaya lingkungan (*environmental cost reducing*) dan menghindari atas biaya-biaya tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan (*environmental quality*) Gale dan Peter (2001:121). Sambharakresna (2009) menambahkan, akuntansi lingkungan keuangan menekankan pada analisis dan pelaporan komponen biaya dan kewajiban yang berhubungan dengan masalah-masalah lingkungan.

3. Fungsi dan peran akuntansi lingkungan

Fungsi akuntansi lingkungan menurut Fasua (2011) dibagi menjadi dua yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal:

a. Fungsi internal:

Untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisiensi serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Fungsi ini diharapkan akuntansi lingkungan

sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis (Ikhsan, 2008:18).

b. Fungsi eksternal:

Berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Pada fungsi ini faktor paling penting yang perlu diperhatikan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk akuntansi.

4. Standar Terkait Akuntansi Lingkungan

PSAK No. 1 Paragraf 14 (Revisi 2015) yang menyatakan: “Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah diluar dari ruang lingkup SAK.”

Penyajian laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan PSAK No. 1 Paragraf 10 (Revisi 2015) yang meliputi enam point yaitu (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan; (ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; (f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

5. Pengukuran Akuntansi Lingkungan

Pembahasan biaya lingkungan tidak bisa lepas dari akuntansi lingkungan. Pengukuran biaya lingkungan pada organisasi masih dapat dilakukan karena biaya penanganan material, daur ulang sisa material, pengolahan dan pembuangan limbah kemungkinan masih dalam kendali manajemen produksi perusahaan. Foster dan Sjoblom, 1996; Anderson dan Sedatole 1998 dalam Wiyantoro dkk (2011) menjelaskan, bahwa kesulitan dalam pengukuran biaya lingkungan akan muncul ketika seorang akuntan berusaha untuk menetapkan biaya lingkungan yang bersifat eksternalisasi yang muncul karena emisi gas, limbah cair, dan limbah padat dari proses produksi. Untuk mengukur tingkat kesulitan tersebut digambarkan dalam kelompok biaya lingkungan dimulai dari *conventional costs*, *potentially hidden cost*, *contingen cost*, *relationship costs*, and *societal costs* (EPA, 1995 dalam Panggabean dan Deviarti 2012).

6. Penyajian Akuntansi Lingkungan

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif, standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi objek harus disajikan secara terpisah dari laporan utama, apakah suatu informasi harus disajikan digabung dengan akun laporan keuangan yang lain, apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (Suwardjono, 2014). Perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Model

komprehensif yang dapat dijadikan sebagai alternatif model pelaporan keuangan lingkungan secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 (empat) macam model, antara lain (Haryono, 2003):

- a. Model Normatif. Model ini berawal dari premis bahwa perusahaan akan membayar segalanya. Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya.
- b. Model Hijau Model hijau menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih. Selama suatu perusahaan menggunakan sumber daya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar konsumsi atas biaya sumber daya. Proses tersebut memaksa perusahaan menginternalisasikan biaya pemakaian sumber daya meskipun mekanisme pengakuan dan pengungkapan belum memadai dan kemudian melaporkan biaya tersebut dalam laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan induk untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan lingkungan di perusahaannya.
- c. Model Intensif Lingkungan. Model pelaporan ini mengharuskan adanya pelaksanaan kapitalisasi atas biaya perlindungan dan reklamasi lingkungan. Pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi dengan sehingga dalam laporan keuangan selain pembiayaan yang diungkapkan secara terpisah, juga

memuat mengenai catatan-catatan aktiva tetap yang berhubungan dengan lingkungan yang dianggap sebagai investasi untuk lingkungan.

- d. Model Aset Nasional. Model aset nasional mengubah sudut pandang akuntansi dari tingkat perusahaan (skala mikro) ke tingkat nasional (skala makro), sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan tekanan terhadap akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam. Dalam model ini dapat ditekankan bahwa selain memperdulikan lingkungan dalam pengungkapannya secara akuntansi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai aset nasional yang dipandang sebagai tanggung jawab secara nasional. Variasi alternatif model dalam perbedaan materi yang diungkap antara perusahaan satu dengan perusahaan yang menganut model lainnya lebih banyak disebabkan oleh faktor tingkat kompleksitas dan tingkat kebutuhan masing-masing operasional usaha. Perusahaan dapat memilih alternatif model varian dalam menentukan sikap dan bentuk tanggungjawab sosialnya sesuai dengan 20 proporsional masing-masing, namun secara substansial bahwa pertanggungjawaban lingkungan tetap menjadi pertimbangan utama setiap perusahaan.

7. Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Pengungkapan dalam arti luas berarti penyampaian informasi (Wiyantoro dkk, 2011). Akuntan cenderung menggunakan pengungkapan ini dalam pengertian yang lebih terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan perusahaan dalam laporan keuangan tahunan (Hendriksen dan Van Breda, 2002:429-430).

Terdapat beberapa bentuk pengungkapan menurut Hendriksen dan Van Breda (2002:439-444) yaitu: ramalan keuangan, kebijakan akuntansi, perubahan akuntansi, dan pengungkapan peristiwa pasca laporan. Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan

8. Biaya Lingkungan

Ikhsan (2009) menjelaskan, biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah bagaimana cara mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang dan biaya-biaya manajemen yang potensial. Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal serta berhubungan dengan semua biaya yang terjadi dalam hubungan dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan.

Menurut Hansen dan Mowen (2009), biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah produksi limbah atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah daur ulang produk, workshop, dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi.
2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk,

proses, dan aktivitas lain perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti. Contohnya adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), dan pelaksanaan pengujian pencemaran.

3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksi limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah atau sampah. Contohnya adalah sewa diesel untuk pembersihan limbah.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kategori direalisasi dan tidak direalisasi. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realized external failure cost*) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Biaya kegagalan yang tidak direalisasi (*unrealized external failure cost*) atau biaya sosial (*societal cost*) disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak luar perusahaan. Contohnya tanggung jawab pencemaran lingkungan, dan humas.

Biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling nyata dalam mengukur ketidakpastian. Pada dasarnya biaya lingkungan berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik (Dewi, 2016).

9. Tanggung Jawab Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)

Wineberg dan Rudolp mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai: *“The contribution that a company makes in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy”*.

Sebagaimana yang diungkapkan para pakar akuntansi, pengertian dan konsep CSR akan terus mengalami perkembangan. CSR muncul dari istilah akuntansi lingkungan yang sama artinya dengan akuntansi sosial ekonomi (*social economic accounting*). Berdasarkan hal itu, Davis dan Frederick pada tahun 1992 menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban organisasi perusahaan bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri (Azheri, 2012:27).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kontribusi sukarela berupa barang, jasa dan keuangan kepada masyarakat dan termasuk kegiatan langsung terkait dengan aktifitas produksi dan perdagangan perusahaan. Dilihat dari regulasi yang berlaku di Indonesia, saat ini sudah terdapat beberapa regulasi yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan CSR antara lain; UUD Pasal 33 UUD 1945, UU No. 23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40/2007 Tentang Perseroaan Terbatas.

Terdapat juga Peraturan Menteri BUMN No. 5/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam berbagai peraturan ini, pada dasarnya telah tersirat berbagai upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun korporasi untuk melakukan pengembangan masyarakat dan lingkungan, baik pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun lingkungan (Puspita dan Murtiningtyas, 2013).

Semakin besar dan konsisten perusahaan mengungkapkan isu-isu CSR, semakin besar pula manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Meskipun, dalam jangka pendek mengurangi kas dan menurunkan laba. Akan tetapi, dalam jangka panjang akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Manfaat ekonomi tersebut adalah :

- 1) Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam jangka panjang
- 2) Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen
- 4) Meningkatkan komitmen, etos kerja, efisiensi, dan produktivitas karyawan
- 5) Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan
- 6) Menurunkan kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan serta dihargai perusahaan, dan
- 7) Meningkatkan reputasi, *goodwill*, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Lako, 2011:8)